

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari pelayanan masyarakat adalah dengan menegakkan supremasi hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang diwujudkan dalam upaya meningkatkan profesionalisme POLRI dibidang penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan penerapan fungsi manajemen, pengawasan dan pengendalian sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai yaitu penyelesaian perkara secara tuntas serta sistem penyidikan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan amanat dari undang - undang tersebut harus diikuti dengan integritas moral dan dedikasi yang tinggi, disiplin serta profesionalisme dari anggota POLRI itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja POLRI saat ini masih dirasakan kurang, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya kesan yang kuat dalam masyarakat bahwa POLRI tidak tanggap, diskriminatif dan kurang profesional dalam menangani laporan masyarakat serta masih adanya oknum yang mempunyai sikap perilaku belum santun, tidak terpuji dalam pelayanan. Keragaman budaya,

suku, agama, dan etnis yang ditambah dengan pergeseran nilai - nilai luhur Pancasila dalam peri kehidupan sebagian masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi potensi terciptanya konflik sosial. Berdasarkan data dari Bag Ops Polres Jepara terkait dengan pengungkapan kasus khususnya menyangkut kejahatan (pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian lainya serta penyalahgunaan narkoba) dapat dilihat dalam Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1.
DATA KEJAHATAN MENONJOL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA
TAHUN 2013 S/D 2016

N O	JENIS KEJAHATAN	2013			2014			2015			2016		
		L	S	SELRA	L	S	SELRA	L	S	SELRA	L	S	SELRA
1	CURRAT	79	45	57%	74	35	47%	94	34	36%	129	18	14%
2	CURRANMOR	51	31	61%	99	33	33%	78	9	12%	128	14	11%
3	CURRAS	12	10	83%	11	7	64%	13	5	38%	14	3	21%
4	NARKOBA	22	22	100%	19	19	100%	16	16	100%	31	29	93%
5	ANIRAT	1	0	0%	2	2	100%	1	1	100%	0	0	0%
6	PEMBAKARAN	0	0	0%	28	28	100%	36	36	100%	11	11	100%
7	PERKOSAAN	9	8	89%	3	3	100%	1	0	0%	0	0	0%
8	PEMBUNUHAN	4	2	50%	0	0	0%	4	3	75%	2	2	100%
9	UPAL	2	2	100%	2	2	100%	3	3	100%	1	1	100%
10	PENIPUAN	32	20	63%	91	30	33%	63	29	46%	49	13	26%
	JUMLAH	212	140	66%	329	159	48%	309	136	44%	365	91	25%

Sumber: laporan tahunan Bag Ops Polres Jepara (2013-2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kondisi saat ini dalam kurun waktu 2013-2016 kualitas kinerja masih kurang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih rendahnya penyelesaian perkara (selra), yaitu masih jauh dari target yg ditentukan POLDA 75%. Pada tahun 2013 terdapat 212 kasus dengan penyelesaian sebesar 140 kasus (66%). Data tahun 2014 menunjukkan penurunan prosentase sebesar 48%, yaitu terdapat kasus sebesar 329 dengan tingkat penyelesaian sebesar 159 kasus. Penurunan tingkat penyelesaian kasus menurun kembali ditahun 2015

(44%) dari 309 kasus, hanya 136 kasus bisa terselesaikan. Dan penyelesaian kasus di tahun 2016 hanya 25 % dimana dari 365 kasus yang terjadi hanya 91 kasus yang bisa diselesaikan. Sehingga hal itu jauh dari target yang ditentukan oleh Polda Jawa Tengah. Kinerja Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba dikatakan berhasil apabila jumlah tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun harus cenderung menurun dan penyelesaian perkara cenderung naik. Hal ini dikarenakan Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Jepara dihadapkan pada permasalahan tidak efisien, kurang efektif, kurang profesional serta kurangnya sumber daya manusia yang menguasai kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Banyak indikator yang menunjukkan peningkatan kerja satuan reserse, pengungkapan perkara merupakan salah satu out put yang diharapkan dari upaya optimalisasi penyelidikan. Pengungkapan perkara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dicapai karena langsung berhubungan pada penilaian masyarakat atas profesionalisme POLRI. Dengan kata lain sebaik apapun pelayanan POLRI dibidang reserse kepada masyarakat cenderung akan mudah dilupakan jika tingkat pengungkapan perkara rendah. Oleh karena itu upaya pengungkapan perkara menjadi satu hal yang sangat penting untuk dicapai. Sebagai salah satu bentuk pemberian pelayanan prima satuan reserse kepada masyarakat. Kegagalan satuan reserse dalam pengungkapan perkara merupakan kegagalan POLRI dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bila hal ini terus berlanjut bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat kepada POLRI akan semakin tergerus dan menurun.

Polisi Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga Polisi Republik Indonesia dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, dengan cara menunjukkan kinerja yang baik, profesional dan handal dalam bidangnya. Dengan demikian polisi ditegaskan sebagai pekerjaan profesional, otomatis menuntut adanya prinsip profesionalitas yang selayaknya dijunjung tinggi. Seorang aparat kepolisian hendaknya memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang jelas serta kinerja/prestasi.

Pelaksanaan revitalisasi Polri di Indonesia merupakan sebuah strategi khusus agar kinerja SDM dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran. Revitalisasi Polri ini termasuk sebagai langkah dari reformasi birokrasi Polri yang dapat dianalisis melalui teori reformasi birokrasi seperti yang dikatakan (*Sedarmayanti, 2009*), yaitu perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, pola tindak). Dalam kondisi demikian maka *employee engagement* menjadi hal yang penting untuk diperhatikan Polres Jepara dalam meningkatkan kinerja anggotanya.

Koordinasi lintas sektoral di Polres Jepara menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan kinerja Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba. Sebagai fungsi yang mengemban tugas represif, Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba harus banyak berkoordinasi dengan fungsi preemtif dan fungsi preventif yang ada di Polres Jepara. Di Polres Jepara perbedaan persepsi dan orientasi dalam mencapai tujuan masing - masing personil berpotensi menjadi masalah ketika masing - masing individu tidak dapat melaksanakan fungsi koordinasi dan tidak dapat bekerja sama dengan baik

dengan personil dari satuan yang berbeda. Sehingga terlihat bahwa koordinasi lintas fungsi belum dijalankan secara maksimal. Bekerja dalam kelompok mensyaratkan adanya kerja sama antar individu yang terdiri dari berbagai fungsi sementara pada saat yang sama terdapat perbedaan kepentingan dan sudut pandang yang tidak terelakan manakala masing - masing individu dari berbagai fungsi bekerja sama dalam satu operasi oleh karena perbedaan orientasi dalam mencapai tujuan, hubungan perorangan dan unsur - unsur dari luar.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Hasil penelitian Dhermawan *et.al* (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Golini *et. Al* (2014) yang menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari kompetensi, yang artinya semakin tinggi kompetensi SDM maka akan meningkatkan prestasi kerja SDM. Penelitian tentang *employee engagement* diantaranya adalah Christian *et.al* (2011) menyatakan ketika SDM memiliki *engagement* yang tinggi terhadap organisasinya maka akan memiliki kinerja SDM yang tinggi. Karena *employee engagement* merupakan sikap positif yang dimiliki oleh SDM terhadap organisasi. Individu yang terikat dengan organisasinya akan lebih memiliki prestasi kerja yang tinggi. Hal ini berbeda dengan hasil Azwar (2013) yang menyatakan bahwa *job engagement* tidak mempengaruhi kinerja. Untuk menjawab perbedaan hasil penelitian pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja maka variabel *employee engagement*

diajukan sebagai variabel intervening yang mampu memediasi pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja. berdasarkan kontroversi hasil penelitian *employee engagement* tersebut maka dalam penelitian ini diajukan variabel koordinasi lintas fungsi sebagai variabel moderasi.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penjabaran *research gap* dari hasil penelitian Dermawan *et.al* (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja sumberdaya manusia. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Golini *et. Al* (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan faktor pendukung utama kinerja yang artinya semakin tinggi kompetensi sumberdaya manusia maka akan meningkatkan kinerja sumberdaya manusia. Perbedaan hasil penelitian Christian *et.al* (2011) yang menyatakan ketika sumberdaya manusia memiliki *engagement* yang tinggi terhadap organisasinya maka akan memiliki kinerja sumberdaya manusia yang tinggi. Hal ini berbeda dengan hasil Azwar (2013) yang menyatakan bahwa *job engagement* tidak mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas maka rumusan masalah (*research problem*) dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana peningkatan kinerja sumberdaya manusia anggota Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Jepara melalui kompetensi profesional dan *employee engagement* dengan pengaruh efek koordinasi lintas fungsi”, kemudian pertanyaan penelitian (*question research*) yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi profesional terhadap *employee engagement*?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi profesional dan *employee engagement* terhadap kinerja?
3. Bagaimana pengaruh koordinasi lintas fungsi terhadap hubungan antara kompetensi profesional dan *employee engagement* terhadap kinerja?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan, kompetensi profesional, *employee engagement*, serta koordinasi lintas fungsi terhadap sumberdaya manusia.
2. Menyusun model peningkatan kinerja sumberdaya manusia.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pengembangan ilmu Manajemen khususnya manajemen sumberdaya manusia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber informasi, referensi dan bahan pengambilan keputusan bagi Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Jepara dalam usaha meningkatkan kinerja sumber daya manusia khususnya anggota Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Jepara sebagai wujud usaha dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.